

BAB II

PROSES INTEGRASI TIMOR TIMUR KE WILAYAH INDONESIA

A. Keadaan Geografis Timor Timur

Timor Timur disebut dengan Republik Timor Leste yang merupakan negara baru yang berdiri sebagai sebuah negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Ketika Timor Timur menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor Leste” sebagai nama resmi negara mereka.

Secara geografis Timor Timur adalah sebuah negara yang terletak di Pulau Timor sebelah timur dengan luas wilayah 18.898 km², dan berada di jajaran kepulauan Nusa Tenggara. Letak geografis Timor Timur terbentang antara 123 derajat 25’ dan 127 derajat’ Bujur Timur dan diantara 8 derajat 22’ serta 10 derajat 22’ Lintang Selatan. Terdapat dua pulau yang cukup besar termasuk dalam wilayah Timor Timur yaitu Pulau Atauro di sebelah utara Dilli dan Pulau Jaco di ujung timur. Disamping itu ada satu wilayah kecil yang terpisah dari wilayah Timor Timur, yaitu daerah Ambeno yang terjepit diantara Nusa Tenggara Timur. Adapun batas-batas wilayah Timor Timur sebelah Utara ialah Selat Wetar dan Selat Ombai, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan, luas dataran rendah di Pulau Timor hanya 20% dari luas pulau (Abdul Syukur, dkk 2012: 522).

Timor Timur memiliki susunan tanah yang terdiri dari lapisan kapur sedimentair, karang, tanah liat, dan sering ditandai adanya rangkai-rangkai tanah pegunungan. Tanah kering terdapat dimana-mana dengan bukit-bukit gersang dan

hanya di beberapa tempat saja yang nampak hijau. Seperti dijelaskan oleh Rifki Satianegara (1996: 13) bahwa disana juga terdapat hutan yang cukup lebat di Viqueque dan Lautem dengan didominasi oleh pohon kelapa dan palem untuk di daerah pesisir dan pohon kayu putih, kayu merah, pohon lontar dan pohon cendana.

Laut Timor bergelombang besar sepanjang musim, sedangkan Laut Sawu dan Selat Wetar hanya bergelombang besar pada musim angin barat. Seluruh wilayah Timor Leste termasuk daerah beriklim panas dengan suhu bervariasi dan bercorak iklim muson seperti lazimnya di daerah-daerah tropis lainnya. (Machmuddin Noor, 1977: 307).



Gambar 1.1Peta Timor Leste
Sumber: <http://www.maptimortimur.com>.

Pulau Timor terkenal sebagai penghasil kayu cendana, terutama kayu cendana putih yang paling tinggi mutunya dan yang paling banyak peminatnya. Sebelum sumber alam ini mengalami pengurangan besar-besaran pada abad ke-19, kayu cendana menyebar luas di seluruh Timor sampai ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Perdagangan kayu cendana ini memiliki ciri benang emas tipis yang menghubungkan pantai-pantai Jawa dan terus ke India dan Cina. Kayu cendana memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga tidak heran jika kayu wangi ini memasuki lingkaran perdagangan jarak jauh sebagai barang mewah (Gunn, 2005: 77).

Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh para sarjana Belanda yang menyatakan bahwa pada masa kekaisaran Sriwijaya di Sumatra, kayu cendana dari Timor diangkut ke kawasan Selat Malaka kemudian diangkut melalui jalur perdagangan yang dikontrol angin barat ke India dan Cina. Sumber-sumber dari Cina juga menggambarkan Timor sebagai satu pulau yang diliputi oleh kayu wangi dan setidaknya-tidaknya memiliki dua belas tempat pendaratan, dimana para pedagang Cina melakukan pendaratan, dan pada masa itu juga jalur laut langsung ke Timor dibuka oleh para pelaut Cina melalui Laut Sulu dan Sulawesi ke kepulauan Maluku (Sakurai, 1996: 11).

Dari sumber-sumber Cina tersebut, Roderich Ptak (1987: 32) menyimpulkan paparan Cina paling awal mengenai Timor, yaitu:

Gunung-gunung (Timor) tidak menumbuhkan tanaman lain selain kayu cendana yang sangat berlimpah ruah. Kayu ini diperdagangkan dengan

perak, besi, gelas, kain taf warna-warni dari negara-negara Barat. Seluruhnya ada dua belas tempat yang disebut pelabuhan.

B. Latar Belakang Integrasi

1. Proses Dekolonisasi Pemerintahan Portugis 1974-1975

Timor Timur adalah bekas daerah jajahan Portugis, selama kurang lebih empat ratus tahun daerah ini berada di bawah pengaruh kekuasaan Portugis. Sejak abad ke-15, Pulau Timur sudah menjadi daerah tujuan pelayaran dan perdagangan dari perahu-perahu dagang Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, India, Arab, dan Cina. Pulau Timur dikenal kaya akan kayu cendana, barang dagangan yang laku di pasaran Asia. Sejak masuknya bangsa Barat seperti Portugis dan Belanda ke Nusantara, Pulau Timor juga menjadi daerah tujuan persinggahan mereka setelah berdagang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Pada akhirnya baik Portugis maupun Belanda menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah jajahannya (Abdul Syukur, dkk, 2012: 522).

Daerah Timor Timur merupakan wilayah jajahan Portugis yang terkenal sebagai penjajah yang paling jelek, karena tidak pernah memperdulikan nasib rakyat jajahannya. Hal ini terjadi di seluruh wilayah jajahan Portugis termasuk Timor Timur. Abdul Syukur (2012: 524) menjelaskan bahwa, Timor Barat relatif lebih maju dibandingkan Timor Timur. Hingatahun 1973, 93% penduduk Timor Timur masih buta huruf. Di sekolah dasar Timor Timur, kebanyakan siswa harus mempelajari sejarah Portugis. Siswa juga harus menghafal nama sungai, jalan, dan kota-kota di Portugis, sementara kebudayaan dan tradisi Timor tidak pernah

disinggung. Tingkat pendidikan di zaman penjajahan Portugis jauh ketinggalan dibanding dengan jajahan Belanda. Pendidikan tertinggi yang ada di Timor Timur adalah Liseum atau Sekolah Menengah Atas. Sebagian besar dari anak-anak yang masuk usia sekolah dasar, tidak dapat ditampung mengingat terbatasnya fasilitas gedung sekolah dan tenaga pengajar.

Sementara itu, dilihat dari perkembangan perekonomiannya, Timor Timur masih terbelakang. Tingkat kehidupan rakyat Timor Timur yang masih sederhana, menyebabkan pola materialisasi perekonomian menjadi sangat terbatas. Sistem perekonomiannya masih banyak bersifat barter. Di samping itu rakyat Timor Timur masih senang menyimpan uang dirumah, sehingga peredaran uang makin berkurang (Gunn, 2005: 383).

Tingkat kesehatan masyarakat relative rendah. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyaknya nyamuk malaria. Malaria merupakan penyakit utama. Jumlah penderita dalam tahun 1970 diperkirakan hampir 11% dari jumlah penduduk. Disamping malaria, timbul pula berbagai penyakit seperti: TBC, anemia, dan kekurangan gizi. Sementara fasilitas-fasilitas kesehatan masih sangat terbatas sekali, dan penduduk sendiri masih kuat kepercayaannya kepada dukun dalam melakukan pengobatan (Gunn, 2005: 385).

Pada tahun 1960 pemerintah Portugis terpengaruh oleh Resolusi PBB, hingga mengubah status negeri-negeri jajahannya menjadi propinsi seberang lautan. Kebijakan yang diambil ini merupakan suatu strategi politik kolonial, yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan membentuk suatu kelompok elite yang tetap loyal kepada penjajah. Caranya dengan mendorong masyarakat

jajahannya agar selalu berasimilasi ke dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat penjajah. Namun prinsip penjajah tersebut akan menumbuhkembangkan dalam diri masyarakat sikap-sikap anti penjajah. Dari sinilah lahir hasrat untuk melepaskan diri dari penjajah Portugal termasuk Timor Timur. Apalagi pemerintah Portugal tidak tanggap terhadap jeritan, tangisan, permintaan, kebutuhan serta kepentingan warga daerah jajahan (Michele Turner, 1992: 39-40).

Keadaan inilah yang memicu banyaknya perlawanan di daerah jajahan, hingga Portugis kewalahan menghadapi perang kolonial. Keadaan yang semakin buruk ini menyadarkan para perwira-perwira muda menghadapi kenyataan beratnya perang kolonial. Hal ini menimbulkan kebencian kepada rezim Salazar dan berencana mengadakan kudeta. Mereka mendirikan *Movimento* sebagai wadah gerakan. Pada tanggal 25 April 1974 terjadilah kudeta militer yang berhasil dengan sebutan Revolusi Bunga. Revolusi Bunga di Lisbon, Portugis yang dimotori dan dilakukan oleh Angkatan Perang Portugal di bawah pimpinan Major Antonio Espinola, dengan nama gerakan "*Movimento Forças Armadas (MFA)*", telah menyebabkan jatuhnya rezim Salazar-Caetano. Salazar adalah seorang pemimpin Portugis yang berkuasa sejak 1920-an dan Marcello Caetano adalah perdana menteri yang menggantikan Salazar sejak tahun 1960-an. Perubahan politik di tubuh pemerintahan Portugis setelah Revolusi Bunga yaitu dengan menaikan Spinola sebagai Presiden Portugal. Spinola diangkat menjadi Presiden oleh *Movimento Forças Armadas (MFA)* dengan dua program politiknya yaitu gagasan tentang demokratisasi dan dekolonisasi (Neonbasu, 1997: 40).

Pada tahap selanjutnya, terjadi tarik ulur persaingan kebijakan tentang daerah jajahan antara Presiden Spínola dengan perwira MFA yang dulu mengangkatnya. Ada dua versi politik dekolonisasi mengenai daerah-daerah jajahan Portugal, yaitu versi Spínola dan versi Movimento.

a. Politik Dekolonisasi Versi Spínola

Gagasan Spínola tentang dekolonisasi pada dasarnya adalah usaha pembentukan negara federal yang terdiri dari Portugal dan negara-negara jajahannya, yang masing-masing memiliki otonomi intern secara penuh. Setiap anggota federal mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dalam negeri masing-masing. Sementara itu, pemerintah di Lisbon tetap menguasai bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Daerah-daerah jajahan Portugis yang berstatus propinsi diubah menjadi negara bagian dengan otonomi penuh.

Kemudian dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk di daerah jajahan akan memilih persatuan dengan Portugis dalam bentuk federasi, maka Spínola mengusulkan agar diadakan referendum untuk memberi kesempatan kepada rakyat menentukan hari depan negerinya masing-masing. Jelaslah bahwa politik dekolonisasi yang dilakukan oleh Spínola pada hakekatnya hanya sekedar usaha untuk menghentikan perang kolonial yang sangat memberatkan Portugal (Neonbasu, 1997: 42).

b. Politik Dekolonisasi Versi Movimento

Sebagai konseptor dan pelaksana kudeta, Movimento juga mempunyai konsep tentang politik dekolonisasi. Meskipun latar belakang konsep politik Movimento sama dengan konsep Spínola, tetapi konsep Movimento lebih

radikal. Movimento menginginkan agar dekolonisasi dilaksanakan secara konsekuen, tidak melalui gagasan federasi seperti konsep Spinola. Namun mereka menyetujui diadakan referendum yang akan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan keinginan dan menentukan hari depan negerinya masing-masing. Movimento beraksud menciptakan iklim politik bagi daerah-daerah koloni untuk dapat merdeka dengan cara membentuk satuan-satuan kekuatan politik sendiri (Neonbasu, 1997: 42).

Terdapat perbedaan menyolok antara kedua kubu kekuatan. Konsepsi Spinola ternyata bertolak belakang dengan konsepsi Movimento. Bahkan kubu Movimento menyatakan bahwa, visi Spinola bukanlah suatu proses dekolonisasi, melainkan sebuah usaha neokolonialisme. Perbedaan pendapat ini melahirkan polarisasi politik nasional Portugal yang semakin tidak menentu arahnya. Namun pada akhirnya konsepsi Movimento tampil lebih dominan menghadapi kenyataan tersebut.

Dengan alasan demikian, maka Presiden Spinola akhirnya mengundurkan diri pada bulan September 1974, dan digantikan oleh Jenderal Fransisco da Costa Gomes sebagai Presiden, dan Brigjen Vasco Goncalves sebagai perdana menteri. Brigjen Goncalves adalah tokoh utama di balik kudeta militer tahun 1974. Ia mempunyai hubungan yang dekat dengan tokoh Partai Komunis Portugal (Partido Comunista de Portugal), yaitu Alvaro Cunhal. Kedekatan hubungan ini membuat kebijakan pemerintah lebih dekat ke kiri, sehingga kelompok komunis mendapat dukungan kuat dari pemerintah. Pada akhirnya, pengaruh kekuatan kaum komunis

Portugal ini sampai juga ke Timor Timur, baik di bidang birokrasi maupun di kalangan perwira militer Portugal di Timor Timur (Neonbasu, 1997: 43).

Perubahan politik yang terjadi di Portugal membuka lembaran politik baru di negeri jajahannya, dengan memberi peluang lebih besar bagi para pejuang kemerdekaan, untuk merealisasikan proses dekolonisasi yang dijanjikan pemerintah Spinoza. Prisma (1995: 18) menjelaskan bahwa, bagi Timor Timur janji-janji itu berupa pengembalian hak-hak demokrasi, pembebasan para tahanan politik dan pembubaran partai pemerintah Aksi Nasional Rakyat atau *Action National Popular* (ANP), penghapusan Polisi Rahasia, peniadan sensor pers dan kebebasan bagi rakyat untuk membentuk partai-partai politik dan mengambil bagian dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Selain itu pemerintah Portugis juga memberikan tiga opsi kepada rakyat Timor Timur dalam menentukan nasibnya sendiri. Ketiga opsi tersebut adalah: pertama, asosiasi Timor Timur dengan Portugis; kedua, Timor Timur merdeka; dan opsi ketiga, integrasi Timor Timur dengan negara tetangga yaitu Indonesia.

Bagi wilayah Timor Timur, semangat kemerdekaan bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sebelumnya di dalam hati masyarakat Timor Timur. Dalam artian, upaya untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan sudah lama terpendam dalam keinginan masyarakat Timor Timur. Jiwa untuk merdeka atau semangat integrasi ini, sesekali ditunjukkan dalam beberapa perjuangan rakyat Timor Timur pada kurun waktu tertentu.

Semangat rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri pasca Revolusi Bunga diwujudkan dengan membentuk partai politik di Timor Timur.

Setiap golongan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan masa depan wilayahnya tersebut. Hal itu, terlihat dalam perbedaan ideologi yang dianut dalam partai politik di Timor Timur. Setiap partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Adanya partai politik di Timor Timur telah menorehkan sejarah dalam proses integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia.

2. Sistem Kepartaian di Timor Timur

Timor Timur sebagai daerah koloni Portugal tidak memiliki kemajuan yang berarti, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan perkembangan politik. Dalam perkembangan politik misalnya, pada masa Portugal dapat dikatakan rakyat Timor Timur tidak memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan politik, dan kebanyakan dari mereka yang duduk dalam birokrasi didominasi oleh orang Portugal. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Timor Timur masih awam tentang sistem politik, dan mereka belum memiliki sistem politik yang terarah karena kurangnya pengetahuan dalam bidang politik.

Bagi Timor Timur, politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Portugis menjadi salah satu kesempatan untuk membentuk partai-partai politik yang menjadi sebuah wadah bagi suara rakyat. Terdapat lima partai politik di Timor Timur yaitu, UDT (*Uniao Democratica Timorese*), Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*), APODETE (*Associacao Popular*

Democratica Timorese), KOTA (*Klibur Oan Timor Aswa'in*), dan *Trabalhista* (E.M. Tomodok, 1994: 87).

a. Partai UDT (*Uniao Democratica Timorese*)

Partai UDT ini didirikan oleh para tokoh partai Aksi Nasional Rakyat (ANP) pada tanggal 11 Mei 1974 di bawah pimpinan Ir. Mario Viegas Carrascalao yang sebelumnya menjabat wakil ketua ANP Timor Timur. Pendiri lainnya yaitu Fransisco Lopez da Cruz, Domingus de Oliveira, Cesar Augusto da Costa Mousinho yang pernah menjabat sebagai sekretaris ANP, dan Joao Carrascalao (E.M. Tomodok, 1994: 88).

Neonbasu (1997: 44) menjelaskan bahwa, tujuan dari partai UDT ini yaitu, tetap ingin bergabung dengan Portugal, dan setelah beberapa waktu kemudian pemerintah Portugal harus melepaskan diri, sehingga Timor Timur menjadi negara sendiri. Cita-cita UDT adalah membentuk negara Federasi di bawah perlindungan Portugal sesuai dengan gagasan Jenderal Spínola. Pandangan politik partai UDT lebih mengarah kepada Portugal, mereka memiliki semangat dan berjiwa Portugal dengan semboyannya timbul tenggelam bersama Portugal

Partai UDT ini menolak kemerdekaan penuh. Mereka menilai Timor Timur masih lemah dibidang ekonomi, dan tidak mempunyai cukup tenaga terdidik untuk memimpin suatu negara. Dukungan partai banyak diperoleh dari pejabat kolonial terutama golongan kulit putih. Dukungan luas datang dari orang-orang yang diuntungkan kolonialisme Portugal, termasuk kalangan pengusaha keturunan Cina dan individu-individu dari masyarakat Cina. Sebelum kedatangan

Gubernur Lemos Pires pada bulan November 1974, partai ini secara luas mendapatkan dukungan resmi Portugal.

b. Partai Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente*)

Partai ini sebelumnya dikenal sebagai “*Associação Social Democrata de Timor*” (Persatuan Sosial Demokrat Timor/ ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974, kemudian partai ini berganti nama menjadi Fretilin, dengan tokoh-tokohnya: Ramos Horta, Fransisco Xavier do Amaral, dan Nicolau Lobato. Ketua partai dipegang oleh Fransisco Xavier do Amaral, seorang pegawai bea cukai di Dili, sedangkan Ramos Horta dipercaya sebagai sekretaris urusan luar negeri (Neonbasu, 1997: 45).

Partai Sosial Demokrat yang sebelumnya bersifat demokratis dan moderat, kemudian berubah nama menjadi Fretilin yang bersifat revolusioner dan condong kepada komunis. Fretilin mempunyai prinsip perjuangan kemerdekaan penuh bagi Timor Timur, tanpa bergantung pada salah satu negara manapun. Fretilin menolak keras prinsip otonomi luas dalam lingkungan negara Portugis yang dicita-citakan partai UDT dan juga menantang keras ide Apodeti untuk berintegrasi dengan Indonesia. Partai ini berkembang dengan pesat karena dukungan para pegawai rendah, penduduk kota, dan mahasiswa yang bersifat radikal untuk menuntut kemerdekaan bagi Timor Timur. Partai Fretilin berhaluan komunis dengan anggota-anggotanya yang menganut ideologi kiri dan beberapa dari mereka adalah aktivis komunis dari Portugal (E.M.Tomodok, 1994: 133).

Ramos Horta sebagai ketua dari partai Fretilin berusaha mencari dukungan dengan melakukan kampanye-kampanye, dan tidak hanya di Timor

Timor bahkan sampai ke Australia. Di Australia sendiri, partai Fretilin mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi yang menamakan dirinya sebagai CIET (*Campaign for Independent of East Timor*), dan sejak itu Australia menjadi home-base bagi gerakan Fretilin (Soekanto, 1976: 391)

c. Partai Politik APODETI (*Associacao Popular Democratica Timorese*)

Partai politik Apodeti berdiri pada tanggal 27 Mei 1974. Pendirinya adalah Arnaldo dos Reia Araujo, Osorio Soares, dan Guilherme Maria Goncalves. Mereka berpandangan bahwa Timor Timur tidak mungkin menjadi negara merdeka, karena tidak memiliki cendekiawan, teknokrat, kekuatan ekonomi dan sebagainya (E.M. Tomodok, 1994: 94).

Aspirasi pokok kelompok ini yaitu memiliki tujuan untuk memerdekakan diri dari Portugal dan bergabung dengan Republik Indonesia karena persamaan latar belakang sejarah dan cita-cita. Sebelum Rezim Zaldar di Lisboa, Timor Timur sering mengalami pemberontakan sporadis yang bersifat lokal. Gerakan pemberontakan Viqueque tahun 1959 berhasil menyatukan seluruh masyarakat Timor Timur untuk menentang penjajahan Portugal di satu pihak, dan untuk bergabung dengan Indonesia di lain pihak.

Sementara itu dikeluarkan manifesto politik yang merupakan landasan perjuangan partai (E.M. Tomodok, 1994: 98), sebagai berikut.

- 1) Integrasi otonom ke dalam Negara Indonesia berdasarkan hukum internasional.
- 2) Pelajaran bahasa Indonesia diwajibkan di sekolah-sekolah menengah serta perlu di buka sekolah-sekolah dasar berbahasa Indonesia, tanpa menghapus sekolah-sekolah Portugis yang ada.
- 3) Hak serta kebebasan esensial manusia.
- 4) Pembagian anggaran yang adil oleh pemerintah.
- 5) Pemberian pekerjaan yang adil dengan menetapkan gaji minimum.

- 6) Hak mogok kaum pekerja sebagai haknya yang salah.
- 7) Bahasadan devaluasi Portugis.
- 8) Pendidikan serta bantuan kesehatan gratis kepada semua lapisan masyarakat.
- 9) Kebebasan beragama dengan penghormatan khusus kepada gereja Katolik yang selalu menjalankan tugas kemansiaannya dan jika mungkin dibantu karena doktrinnya mengkonsolidasi politik sosialTimor.
- 10) Kebebasan berpikir serta mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab.
- 11) Pemilihan dengan pemberian suara langsung, sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan.
- 12) Apodeti menentang secara terbuka:
 - a. Praktek-praktek tidak berperikemanusiaan serta anti sosial pejabat-pejabat pemerintah dalam mengumpulkan kum pekerja.
 - b. Diskriminasi rasial.
 - c. Korupsi serta semua tindakan kolonialis.

d. Partai Politik KOTA (*Klibur Oan Timor Aswa'in*)

Partai ini pada awalnya bernama APMT (*Associacao Popular Monarquica Timorensis*) yang berdiri pada tanggal 8 November 1974, dan dipimpin oleh Thomas Ximenes. Partai ini kemudian berubah nama menjadi Partai Anak-Anak Pejuang dari Gunung (*Klibur Oan Timor Aswain* = KOTA), yang dipimpin Jose Martins sebagai ketua. Partai ini merupakan partai kecil, tidak seperti partai-partai sebelumnya (Neonbasu, 1997: 45).

Partai KOTA bersikap terbuka bagi ketiga parpol terdahulunya, artinya para pendukung partai tersebut mengikuti salah satu partai pendahulunya. Jose Martins merupakan penggerak dalam partainya, karena dia seorang aktivis dan banyak mengetahui latar belakang dan asal usul para pemimpin UDT dan Fretilin. Partai KOTA memiliki keyakinan bahwa masa depan Timor Timur, bukanlah mandiri sebagai negara merdeka, tetapi bergabung dengan Indonesia.

Tujuan dari partai KOTA yaitu bergabung dengan wilayah Republik Indonesia, karena para pendiri dari partai KOTA yakin bahwa yang paling tepat adalah integrasi ke Indonesia. Hal itu dilihat dari keadaan sosial, ekonomi rakyat Timor Timur yang tidak memungkinkan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Dukungan partai ini dari para karyawan yang berani tampil ke arena politik untuk menyampaikan situasi politik yang tidak menentu pada saat itu (E.M.Tomodok, 1994: 248).

e. Partai Politik Trabalhista

Partai ini didirikan pada tanggal 5 September 1974, dan sebagian besar anggotanya terdiri dari kaum buruh. Partai ini merupakan partai kecil yang terdiri dari para buruh dan mereka mendirikan partai tersebut. Partai Trabalista yang nantinya bergabung dengan partai-partai besar seperti UDT, Apodeti dan KOTA).

Kelima kekuatan politik tersebut pada prinsipnya memperjuangkan tiga (3) alternatif politik yang merupakan pilihannya masing-masing dalam melaksanakan penentuan nasib sendiri, yakni dijelaskan dalam Neonbasu (1997: 46) :

1. Konfederasi/bergabung dengan Portugal (UDT, KOTA, dan Trabalhista).
2. Merdeka penuh, berdiri sendiri tanpa perlindungan (FRETILIN).
3. Integrasi dengan negara Indonesia (APODETI).

Perbedaan pandangan kelima partai politik ini tidak jarang menimbulkan bentrokan antar partai politik, bahkan perbedaan pandangan ini mulai meningkat menjadi konflik bersenjata dan perang saudara di Timor Timur. Perang saudara

yang terjadi di Timor Timur telah memberikan situasi yang menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang rawan.

C. Proses Integrasi Timor Timur ke Wilayah Republik Indonesia

Terpengaruh oleh Resolusi PBB No. 1514/1960 pada 4 Desember 1960, pemerintah Portugal telah mengubah status negeri-negeri jajahannya menjadi Propinsi Seberang Lautan (*provincia ultramarina*), yang berada di benua Afrika dan Asia. Politik dekolonisasi dan demokratisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Portugal terhadap negara jajahannya di Afrika dan Asia terutama di Timor Timur, telah membawa sejarah baru bagi rakyat Timor Timur. Dengan adanya politik tersebut, rakyat Timor Timur antusias untuk membebaskan diri dari kungkungan penjajah selama kurang lebih empat abad lamanya. Keinginan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan upaya untuk menjalankan politik dekolonisasi tersebut, yaitu dengan lahirnya partai-partai politik di Timor Timur yang dikaitkan dengan Resolusi PBB No. 1514/1960 yang menetapkan: *'A non self Governing territory can be said to have reached a full measures of self-goverment by: (a) emergency as a sovereign independent state, (b) free association with an independent state, or (c) integration with and independent state'*. ("Sebuah daerah tak berpemerintahan sendiri dapat menyatakan telah mencapai langkah penuh pemerintahan sendiri dengan: (a) tampil sebagai negara merdeka dan berdaulat, (b) menggabungkan diri secara bebas dengan sebuah negara merdeka, atau (c) mengintegrasikan dan menyatukan diri dengan sebuah negara merdeka") (Neonbasu, 1997: 46).

Pergolakan politik di Portugal pada masa Zalazar membawa dampak bagi negara-negara koloninya. Ketika iklim politik dalam dan luar negeri yang semakin sulit dan tidak menentu, maka muncullah berbagai pemberontakan di Mozambique, Angola, dan Guinea Bissau. Akibatnya, kesulitan finansial pemerintahan Portugal semakin melonjak. Sejak itu popularitas rezim Zalazar menurun. Menanggapi peristiwa tersebut Movimento melakukan kudeta yang bernama Revolusi Bunga pada 25 April 1974 dan berhasil menggulingkan Zalazar yang kemudian digantikan oleh Spinoza. Sejak itu, perubahan iklim politik Portugal didasarkan pada dua prinsip, yaitu demokrasi dan dekolonisasi.

Melihat perubahan yang terjadi di Portugal, Indonesia menyambut baik perubahan dan menganggap bahwa peristiwa tersebut dapat memberikan kesempatan bagi rakyat Timor Timur untuk mempercepat proses kemerdekaan. Sikap Indonesia yang mendukung proses dekolonisasi Timor Timur tertuang dalam memorandum Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik yang diajukan kepada salah satu tokoh Fretilin yaitu Jose Manuel Ramos Horta (Abdul Syukur, dkk, 2012; 526).

Dalam memorandum yang dituliskan pada tanggal 17 Juni 1974 tersebut, Adam Malik menyatakan tiga hal penting yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, bahwa Indonesia tidak bermaksud untuk melakukan ekspansi, dan bahwa Indonesia akan menjaga hubungan baik dengan siapapun yang berkuasa di Timor Timur.

Surat yang dikirimkan oleh Adam Malik mencerminkan sikap Indonesia terhadap Timor Timur hingga bulan September 1974, hal ini disebabkan oleh

beberapa perkembangan penting yang timbul. Perkembangan-perkembangan tersebut akhirnya memaksa Indonesia untuk meninjau kembali kebijakannya terhadap Timor Timur, diantaranya adalah pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Perdana Menteri Whitlam di Wonosobo pada tanggal 5 September 1974 (Soekanto, 1976: 404).

Pada pertemuan tersebut, Whitlam menyatakan bahwa “kemerdekaan Timor Timur tidak akan langgeng dan sia-sia, sehingga pilihan terbaik adalah Timor Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia”. Dalam pernyataan tersebut, terlihat keragu-raguan dari Australia bahwa Timor Timur dapat memperoleh kemerdekaan, terlebih lagi sistem perekonomian dan sistem pertahanan Timor Timur yang masih lemah (Leifer, 1986: 224).

Kebijakan pemerintah Portugal tentang dekolonisasi Timor Timur mulai dilaksanakan ketika Kolonel Lemos Pires menjadi gubernur baru di Timor Timur pada tanggal 25 November 1974. Jatuhnya Spínola dari jabatan Presiden Portugis pada tanggal 30 September 1974 dan digantikan oleh Jenderal da Costa Gomez yang berasal dari golongan radikal, juga menjadi salah satu unsur perubahan kebijakan Indonesia terhadap Timor Timur. Portugis kemudian merencanakan penguasaan Timor Timur kepada Fretilin. Pandangan Fretilin yang kekiri-kirian dan adanya keikutsertaan Partai Komunis Portugis (PCP) di dalam partai tersebut (Neonbasu, 1997: 44).

Mulculnya partai politik di Timor Timur merupakan langkah awal bagi mereka untuk menyuarakan aspirasinya terhadap kebijakan Portugal. Partai-partai politik besar, seperti Fretilin, UDT, dan Apodeti berjuang untuk mendapatkan

keinginannya sesuai dengan tujuan dan kehendak partai tersebut dalam menentukan masa depan Timor Timur. Masing-masing partai berlomba-lomba untuk mencari dukungan rakyat yang akan menentukan kemenangan mereka dalam pemilihan umum tahun 1975, sesuai dengan janji dari pemerintahan Portugal (E.M.Tomodok, 1994: 106).

Persaingan untuk mendapatkan suara terbanyak dalam referendum tersebut, menjadikan partai-partai politik di Timor Timur berlomba-lomba dalam mengatur strateginya. Adanya pernyataan Presiden Spinoza tentang dekolonisasi dan kemerdekaan tanpa menyebut Timor Timur, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dalam partai Fretilin yang menghendaki kemerdekaan Timor Timur. Tidak hanya itu, pernyataan Spinoza tersebut juga telah menimbulkan keguncangan dalam partai UDT dan mendorong partai tersebut untuk melihat kembali tujuannya yang ingin berintegrasi dengan Portugal.

E.M.Tomodok (1994: 130) perubahan tujuan Partai UDT yang memilih kemerdekaan Timor Timur dalam ikatan Commonwealth membuat tokoh-tokoh Partai Fretilin melihat titik terang. Dengan melihat hal tersebut, Partai Fretilin bersama UDT membentuk koalisi pada tanggal 20 Januari 1975 untuk bekerjasama, yang diharapkan mampu merebut suara mayoritas dan dapat mengalahkan Partai Apodeti. Sejak terbentuknya koalisi kedua partai dengan bantuan militer, aksi-aksi penggeladahan, penyiksaan dan pembakaran rumah-rumah anggota Apodeti kian meluas. Sementara itu, orang-orang yang memiliki kartu anggota Apodeti, dipaksa mengembalikan kartu anggotanya untuk diganti dengan kartu anggota Fretilin dan UDT .

Dalam keadaan tersebut Partai Apodeti merasa terpojokan, karena Pemerintah Portugal selalu berpihak kepada Fretilin/UDT. Sementara itu, Apodeti berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Dalam keadaan sulit Fretilin/UDT mengeksploitasi keadaan lewat provokasi radio dengan menuduh Apodeti sebagai biang keladi dari segala kerusuhan di Timor Timur. Pihak Fretilin/UDT mengambil langkah dengan mendirikan kubu-kubu pertahanan serta pos-pos pengintaian militer untuk menanggulangi adanya ancaman invasi dari Indonesia dengan dukungan Apodeti.

Namun, koalisi antara Fretilin dengan UDT tidak berjalan lama, belum ada dua bulan sejak terbentuknya koalisi tersebut Fretilin sudah mulai menunjukkan dominasinya dalam partainya. Hal itu terlihat dalam kunjungan delegasi Partai Buruh Australia, yang diharapkan mampu memperkuat kedudukan koalisi kedua partai tersebut. Akan tetapi, terlihat dominasi dari tokoh-tokoh Fretilin yang bertindak berlebihan, misalnya menjemput kedatangan delegasi di pelabuhan Dili, pembagian bendera lebih banyak kepada para anggota Fretilin, dan dalam acara tertentu pimpinan UDT tidak ditonjolkan serta dalam kampanye-kampanye Fretilin hanya menonjolkan partainya saja tidak menyebutkan UDT sebagai koalisinya. Salah satu penyebab khusus pecahnya koalisi Fretilin-UDT menurut para pimpinan UDT yaitu, karena Fretilin berhaluan komunis dan mereka sadar akan bahaya kaum komunis baik di Portugal maupun di Timor Timur sebagai daerah jajahannya. Hal tersebut membuat UDT menarik sokongannya dan kembali kepada tuntutan semula, yaitu kemerdekaan bagi Timor Timur secara bertahap (E.M.Tomodok, 1994: 192-234).

Pecahnya koalisi Fretilin-UDT banyak diwarnai tindak kekerasan, seperti di tempat sepanjang garis perbatasan, banyak terjadi keributan, perkelahian, dan pembunuhan, misalnya di Suai, Bobonaro, Oe Cusse dan di berbagai tempat lainnya. Kota Dili tidak pernah sepi dari gangguan massa ekstrim kiri Fretilin. Dalam keadaan tersebut pemerintah tidak dapat menangani perasaan takut, cemas masyarakat Dili terhadap perbuatan-perbuatan Fretilin.

Pemerintah Portugal mulai melihat ketidakstabilan yang meningkat di Timor Timur. Untuk mengantisipasi keributan yang berlarut-larut Pemerintah Portugal berencana untuk mengadakan pertemuan dengan ketiga partai politik tersebut. Pertemuan Makao itu akan membahas tentang dekolonisasi di Timor Timur. Namun dalam pertemuan tersebut, wakil dari Fretilin menolak hadir karena tidak mau duduk bersama Apodeti yang memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Fretilin tetap akan melaksanakan perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaan dengan menggunakan semboyan “Merdeka atau Mati”. Sikap Fretilin tersebut tidak hanya memperlambat dekolonisasi, tetapi juga menimbulkan kekacauan di Timor Timur (E.M.Tomodok, 1994: 236)

Pertemuan Makao yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 29 Juni 1975 dihadiri oleh delegasi Portugal, Apodeti dan UDT. Ketidakhadiran Fretilin dalam pertemuan Makao tersebut tidak menghalangi niat mereka untuk menentukan dekolonisasi, hanya saja Fretilin tidak diikutkan dalam penandatanganan protokol persetujuan yang akan diratifikasi oleh Presiden Republik Portugal yang akan menetapkan skema dekolonisasi Timor Timur sesuai dengan Undang-undang Konstitusional Dewan Tertinggi Revolusi.

Sementara itu, demonstrasi-demonstrasi dilakukan UDT untuk menunjukkan perasaan antipati terhadap gubernur, karena gubernur tidak pernah memberikan sanksi kepada Fretilin. Sekitar 3000 orang demonstran UDT diturunkan ke Dili dengan persenjataan seperti, parang, tombak dan panah. Mereka berkeliling Dili menggunakan truk sambil meneriakkan yel-yel. Perkelahian juga terjadi antara anggota UDT dengan Fretilin. Melihat hal demikian Fretilin mengimbangi demonstrasi-demonstrasi UDT yang menguasai kota Dili dengan cara menyerang, menangkap dan merampok rumah-rumah orang UDT di luar Dili. Pada tanggal 10 Agustus 1975 pasukan bersenjata Fretilin menyerang dan mengganas di daerah Atsabe. Hal itu mengakibatkan banyaknya korban berjatuhandi kedua belah pihak (Hendro Subroto, 1996: 33).

Situasi di Timor Timur kian memanas ketika UDT melakukan gerakan yang menyerupai kudeta pada tanggal 11 Agustus 1975. Pada saat itu anggota UDT melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan markas besar polisi dengan melucuti senjata polisi. Mereka melakukan aksi tersebut dengan berdemonstrasi menuntut pengusiran dan penumpasan orang-orang komunis dari Timor Timur. Banyak tokoh-tokoh Fretilin yang melarikan diri ke gunung-gunung, sedangkan orang-orang Fretilin yang tidak sempat melarikan diri di tawan oleh UDT (Hendo Subroto, 1996: 33-34).

Gerakan yang dilakukan oleh pihak UDT ini, dimaksudkan untuk melaksanakan suatu gerakan revolusioner anti pengaruh komunis dengan sasaran utama yaitu memisahkan Timor Timur dari Fretilin. Partai UDT didukung oleh angkatan kepolisian, dan mulai bergerak dengan menguasai tempat-tempat

strategis di dalam kota dan mulai menahan aktivis Fretilin di Dili. Sebagian anggota Fretilin melarikan diri ke luar kota. Sementara itu tawanan Fretilin yang berada di Dili diperlakukan dengan baik, namun di daerah-daerah di luar kota Dili banyak yang terbunuh. Kesalahpahaman antar kedua partai politik ini, mengakibatkan perang saudara antara Fretilin-UDT yang memaksa Portugis untuk mengungsikan warga negara asing yang sedang berada di Timor Timur (Neonbasu, 1997: 50).

Fretilin kembali menjalin koalisi dengan Apodeti, setelah koalisinya gagal bersama UDT. Fretilin mengadakan pendekatan dengan Apodeti yang kemudian membentuk Komisi Tentara dan dasar gerakannya non-politis, hanya berdasarkan pada kemanusiaan. Semua perlakuan keji yang dilakukan UDT dirasakan oleh masyarakat Timor Timur sebagai penghinaan orang-orang Portugal putih terhadap pribumi Timor. Dengan melihat perlawanan yang dilakukan UDT terhadap Fretilin mengakibatkan Fretilin melakukan serangan balik yang mayoritas didukung oleh tentara kolonial hingga membuat UDT kewalahan menghadapinya. Banyak anggota UDT yang dibunuh oleh pasukan anggota Komisi Tentara. Serangan Fretilin yang hebat membuat pasukan UDT meninggalkan wilayah Timor Timur dan pergi ke perbatasan. Perang saudara antara Fretilin melawan UDT dikhawatirkan akan memancing keterlibatan Indonesia untuk menginvasi Timor Timur (E.M.Tomodok, 1994: 270).

Kekuatan Fretilin yang kuat, membuat UDT dan Apodeti meminta bantuan kepada Indonesia berupa bantuan medis, pangan, hingga senjata-senjata berat, bantuan yang diminta oleh kedua partai ini untuk dapat bertahan melawan

kekuatan Fretilin. Akibat dari perang saudara ini Indonesia juga menerima ratusan pengungsi yang berasal dari Timor Timur. Para pengungsi yang lari ke kediaman konsul RI di Dili mengisahkan kekejaman pasukan Fretilin yang membunuh, memerkosa, dan memenggal mereka yang berbeda dengan partai Fretilin. Indonesia tidak dapat bersikap diam terutama pada saat kedatangan para pengungsi ke wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Timur untuk mencari keamanan (Abdul Syukur, dkk, 2012: 529).

Situasi di Timor Timur yang semakin memanas dan kepergian perwakilan pemerintah Portugal di Timor Timur menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Portugal untuk menegakkan kekuasaan dan wibawanya di negeri jajahannya. Penyelesaian politik di Timor Timur tidak mungkin ditangani sendiri oleh Portugis, tanpa mengikutsertakan kekuatan lain untuk membantunya. Dengan kepergian Pemerintah Portugal dari Timor Timur membuat Indonesia harus bertindak ofensif terutama untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dan kestabilan di wilayah Pasifik. Indonesia lalu mengambil tindakan militer untuk meredam pertempuran senjata antara Fretilin dengan UDT dan Apodeti. Operasi Indonesia ini dikenal dengan Operasi Komodo (Taylor, 1998: 105).

Neonbasu (1997: 67) menjelaskan bahwa, negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Australia mendukung invasi yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap wilayah Timor Timur, mereka menghalangi upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk memicu keterlibatan PBB untuk ikut menyelesaikan masalah Timor Timur. Sementara itu, sikap Australia sendiri dengan melihat invansi yang dilakukan oleh Indonesia ke Timor Timur, Australia

yang berada di bawah kepemimpinan Whitlam bersikap seolah-olah setuju tanpa protes, bahkan cenderung diam. Walaupun demikian Australia masih berkebeberatan dengan penggunaan kekuatan militer di Timor Timur.

Kekalahan pasukan gabungan Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista melawan pasukan Fretilin membuat mereka sepakat untuk mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kemungkinan integrasi dengan Indonesia. Petisi yang diajukan pada tanggal 7 Agustus 1975 tersebut memancing kemarahan Fretilin dengan cara melakukan serangan atas tokoh-tokoh Apodeti yang kemudian mereka bantai. Perkembangan baru terjadi ketika pasukan sukarelawan bersenjata dari Indonesia datang membantu pasukan gabungan untuk berperang melawan pasukan Fretilin. Para sukarelawan ini merupakan pasukan Indonesia yang kemudian dijadikan pasukan pemukul dari partai UDT dan Apodeti. Operasi militer pasukan sukarelawan dari Indonesia, pasukan Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista melawan Fretilin dipusatkan di daerah perbatasan Timor Barat sebagai upaya untuk memperlemah penguasaan wilayah oleh Fretilin. Pasukan sukarelawan Indonesia dikoordinasikan oleh intelejen Indonesia yang melibatkan kesatuan ABRI yang menggunakan pakaian preman atau seragam militer yang dibalik (Abdul Syukur, dkk, 2012: 529)

Hendro Subroto (1996: 51-60) menjelaskan Pasukan UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista kemudian saling bergabung. Didukung oleh pasukan sukarelawan Indonesia mulai melakukan serangan balik terhadap pasukan Fretilin. Pada tanggal 7 Oktober 1975, daerah Batugede berhasil direbut. Pasukan gabungan juga berhasil menyita banyak senapan mesin dan mortir buatan Cina.

Dalam pernyataannya, pemimpin UDT, Fransisco Lopez da Cruz mengatakan bahwa setelah Batugede, daerah yang akan menyusul direbut oleh pasukan gabungan adalah Maliana, Atabae, Ermera, Maubara dan Dili. Pada tanggal 14 Oktober 1975, Malianan berhasil direbut dan pada tanggal 16 Oktober 1975, Balibo diambil alih oleh pasukan gabungan. Dalam insiden tersebut, lima wartawan televisi asing dari Australia tewas akibat pertempuran. Dalam buku Taylor disebutkan bahwa pasukan Indonesia yang ikut dalam pengepungan Balibo berasal dari kesatuan Kopassanda dan KKO-AL

Gunn (2005: 420) menjelaskan bahwa, menyadari kedudukannya yang semakin terdesak, pada tanggal 24 November 1975 Fretilin meminta bantuan kepada PBB agar Indonesia menarik mundur pasukannya dari Timor Timur. Kemudian pada tanggal 28 November 1975 Fretilin mencetuskan proklamasi kemerdekaan sepihak di Dili. Dalam proklamasi itu dinyatakan berdirinya suatu negara merdeka dengan nama “ Republik Demokrasi Timor Timur”. Selain pembacaan proklamasi dalam upacara tersebut juga dilakukan penurunan bendera Portugal dan diganti dengan bendera Republik Demokrasi Timor Timur, kemudian menetapkan pemimpin Fretilin Fransisco Xavier do Amaral sebagai Presiden Timor Timur. Dalam kesempatan tersebut Xavier do Amaral mengatakan:

Dalam upaya mengekspresikan aspirasi tertinggi rakyat Timor Timur dan demi menyelamatkan kepentingan paling sah tentang kedaulatan nasional, Komite Sentral Fretilin menyatakan proklamasi secara unilateral, kemerdekaan Timor Timur terhitung sejak pukul 00.00 hari ini. Dan dengan ini menyatakan berdirinya Negara Republik Demokratik Timor Timur, anti-kolonial, anti-imperial (Abdul Syukur, 2012: 530).

Pernyataan kemerdekaan unilateral yang dilakukan oleh Fretilin atas Timor Timur ternyata tidak mendapat pengakuan dari negara-negara barat seperti, Amerika Serikat, dan Australia. Amerika Serikat melalui menteri luar negerinya Henry Kissinger menyatakan pemerintah Amerika Serikat tidak akan mau mengakui kemerdekaan Timor Timur yang dinyatakan oleh Fretilin. Menurutnya, Amerika Serikat lebih mengutamakan hubungannya dengan Indonesia jauh lebih penting, bahkan Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer serta mendukung politik luar negeri Indonesia (Abdul Syukur, dkk, 2012: 530). Selanjutnya, (Soekanto, 1976: 426) menjelaskan bahwa, Australia melalui Menteri luar negerinya Andrew Peacock, dalam wawancaranya pada tanggal 16 Desember 1975, menjelaskan bahwa Australia tidak mendukung Fretilin dan tidak akan pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Timor Timur yang dilakukan secara sepihak oleh Fretilin pada tanggal 28 November 1975. Sementara itu, Indonesia pun tidak mau mengakui kemerdekaan unilateral yang dilakukan oleh Fretilin, kekuarangan pengakuan itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai tanda bahwa negara-negara tersebut mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Dua hari sesudahnya, sebagai upaya untuk mengimbangi proklamasi kemerdekaan Fretilin, koalisi partai UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista mengeluarkan deklarasi untuk berintegrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November 1975 di Balibo. Deklarasi itu adalah pernyataan kesepakatan mereka atas nama rakyat Timor Timur memproklamasikan pengintegrasian Timor Timur ke negara kesatuan RI sebagai propinsi ke-27. Teks proklamasi keempat

organisasi politik tersebut dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Portugis, (E.M.Tomodok, 1994: 307-309) sebagai berikut terjemahannya:

PROKLAMASI

Kami, rakyat dan jajahan Timor Timur dalam hal ini diwakili oleh Apodeti, UDT, KOTA dan Partido Trabalhista, setelah mengadakan analisis yang seksama sesudah aksi sepihak Fretilin yang diwujudkan melalui “proklamasi kemerdekaan” wilayah Timor Timur, yang menempatkan diri di bawah kekuasaan Pemerintah Portugal, dan yang dalam segala hal bertentangan dengan kepentingan nyata rakyat Timor Timur.

Mengingat bahwa kondisi untuk pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Timor Timur tidaklah disiapkan secara sah;

Mempertimbangkan fakta bahwa sejumlah prakarsa sudah diusahakan sebagai bukti adanya kehendak untuk memperoleh penyelesaian politik yang adil dan damai sesuai dengan tuntutan orang Timor Timur, misalnya;

Pertemuan Makao yang tidak dihadiri oleh Fretilin, meskipun Pemerintah Portugal sudah mengundang mereka hadir.

Kesiapsediaan Pemerintah Australia menyiapkan kondisi untuk menyelenggarakan dialog tentang masalah Timor Timur di wilayahnya sendiri.

Pertemuan Roma untuk konsultasi-konsultasi timbal balik antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia yang kesimpulan akhirnya adalah *Memorandum of Under Standing* antara kedua negara.

Usaha-usaha yang diupayakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di dalam mengkosongkan daerah perbatasan untuk mengimplementasikan semangat Pertemuan Roma.

Secara bertanggung jawab mengambil kesimpulan bahwa Fretilin dengan sengaja mengabaikan semua upaya yang diuraikan di atas;

Lagipula fakta menunjukkan bahwa cara-cara perjuangan Fretilin yang keliru dan bersifat kriminal, menjauhkan rakyat Timor Timur dari perjuangannya untuk mewujudkan aspirasi-aspirasinya yang sah;

Memperhatikan situasi yang dipaksakan oleh Fretilin ketika memaklumkan secara sepihak kemerdekaan Timor Timur yang menutup semua kemungkinan ke arah penyelesaian secara damai permasalahan yang berkaitan dengan keinginan rakyat;

Merasakan bahwa warisan kolonialis Portugal dan Belanda yang selama hampir 500 tahun memisahkan hubungan darah, *afintities*, nilai-nilai moral dan kebudayaan rakyat Indonesia di Pulau Timor;

Memperhatikan bahwa pada saat ini dapat diharapkan suatu kesempatan untuk memantapkan kembali hubungan tradisional yang kuat dengan bangsa Indonesia;

Dengan nama Allah dan demi alasan-alasan yang telah dikemukakan, kami memproklamasikan dengan sesungguhnya integrasi seluruh wilayah bekas koloni Portugal dengan bahasa Indonesia; pernyataan ini merupakan perwujudan nilai-nilai paling dalam rakyat Timor Timur.

Berkenaan dengan isi Proklamasi integrasi ini, pemerintah dan rakyat Indonesia diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan akan melindungi kehidupan rakyat yang sekarang menempatkan dirinya sebagai bagian dari rakyat Indonesia, namun yang masih hidup di bawah teror dan praktek fasis Fretilin yang dibenarkan oleh Pemerintah Portugal.

Balibo, 30 November 1975

An. APODETI,

An. UDT,

ttd

Guilherme Maria Goncalves
Anggota Presidium

ttd

Fransisco X. Lopez da Cruz
Presiden

ttd

Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium

ttd

Domingos de Oliveira
Sekretaris Jenderal

An. KOTA,

An. TRABALHISTA

ttd

Jose Martins
Presiden

ttd

Domingos C. Pareira
Anggota Presidium

Deklarasi Balibo ini dijadikan dasar bagi kelompok anti-fretilin untuk mengimbangi proklamasi kemerdekaan Timor Timur secara sepihak oleh Fretilin. Berdasarkan permohonan ini maka pemerintah Indonesia memperkuat pasukannya di wilayah perbatasan dan kemudian pada tanggal 7 Desember 1975 mendaratkan pasukannya di Dili. Dalam operasinya Indonesia melancarkan serangan militer ke Dili dengan nama Operasi Seroja. Operasi ini melibatkan hampir 10.000 tentara. Dalam operasi ini, pasukan Kopassanda bersama pasukan dari divisi Brawijaya dan Siliwangi mendarat di Dili. Pendaratan itu dipimpin oleh Jenderal L.B. Moerdani dan Brigjen Dading Kalbuadi. Dalam pertempuran di Dili, menewaskan wartawan asal Australia Roger Ernst (Hendro Subroto, 1996: 116).

Pasukan Fretilin semakin terdesak dan kemudian meninggalkan kota Dili dengan bergerilya di daerah pegunungan sambil membawa 350 tawanan politik, termasuk para pemimpin UDT dan Apodeti. Pada tanggal 17 Desember 1975, koalisi gabungan UDT, Apodeti, KOTA, Tralabista membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (*Temporary Administration of East Timor*) dengan ketuanya Arnaldo dos Reis Araujo dari Apodeti, dan Fransisco Lopez da Cruz dari UDT. Dalam pernyataan yang disebut sebagai “Proklamasi” itu, dinyatakan pula bahwa Pemerintah Sementara tersebut didirikan untuk di atas dasar kebulatan tekad Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana telah diikrarkan dalam Proklamasi 30 November 1975 oleh keempat partai politik di Timor Timur. Adapun isi proklamasi Pemerintahan Sementara Timor Timur ditulis dalam bahasa Portugal, dan berikut ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, (Soekanto, 1976: 382) diantaranya yaitu:

PROKLAMASI

1. Sesuai dengan kebulatan tekad rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri sbagaimana telah diikrarkan di dalam Proklamasi tanggal 30 November 1975 oleh Partai-partai Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista,
2. Dengan telah dibebaskannya ibukota Timor Timur, Dili dan hampir seluruh wilayah Timor Timur dari pengaruh dan kekejaman gerombolan teroris oleh gerakan rakyat Timor Timur yang dipimpin oleh partai-partai Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabista,
3. Terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah Timor Timur adalah kenyataan yang membuktikan akan ketidakmampuan dan tidak bertanggungjawabnya pemerintah Portugal.

Maka dengan ini atas nama rakyat Timor Timur menyatakan berdirinya Pemerintah Semenara Daerah Timor Timue untuk menjamin terselenggaranya, tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal dari pada rakyat Timor Timur dapat dipulihkan.

Dili, 17 Desember 1975
Atas nama Rakyat Timor Timur
Pemerintah Sementara:

1. Presiden Apodeti: Arnaldo dos Reis Araujo
2. Presiden UDT: Fransisco Xavier Lopes da Cruz.

Pada tanggal 18 Desember 1975, Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) mengirim sebuah telegram kepada Presiden Soeharto. Telegram yang dikirimkan berisi permintaan bantuan militer, sosial, dan ekonomi dari Indonesia. Hal tersebut diajukan supaya kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Timur dapat dipulihkan bebas dari gangguan dan ancaman.

Pada tanggal 31 Mei 1976 Indonesia mencoba untuk mengesahkan pendudukannya atas Timor Timur. Indonesia membentuk sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan sekitar 30 orang dari beberapa distrik. Majelis ini membuat sebuah petisi kepada Presiden Soeharto, meminta integrasi Timor Timur ke Indonesia. Kemudian petisi ini ditandatangani oleh Arnaldo de Araujo sebagai ketua PSTT, dan Guilherme Goncalves selaku kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Timur (E.M. Tomodok, 1976: 319).

Adapun isi utama dari petisi singkat itu adalah agar Timor Timur disatukan dengan Republik Indonesia tanpa dilakukan sebuah referendum. Setelah penandatanganan tersebut dilakukan oleh Arnaldo de Araujo dan kepala DPRD Timor Timur, yang kemudian pada tanggal 7 Juni 1976 diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan petisi itu kepada Presiden Soeharto. Atas dasar sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1976, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memutuskan untuk menanggapi secara positif keinginan Rakyat Timor Timur dengan segera melaksanakan proses integrasi wilayah itu ke dalam Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penggabungan

Timor Timur ke wilayah Indonesia pun diajukan kepada DPR-RI pada tanggal 1 Juli 1976. RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia Tingkat I Timor Timur. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1976, Presiden Soeharto menandatangani Undang-Undang No.7 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia dan secara resmi menetapkan daerah tersebut sebagai Propinsi Daerah Tingkat I yang ke-27 dari NKRI (Noor, 1977: 23).

Sejak berintegrasi dengan Indonesia, Timor Timur dibagi menjadi 13 kabupaten, 61 kecamatan, dan 1.739 desa. Pembangunan untuk Timor Timur pun terus direalisasikan oleh Indonesia, seperti terlihat dalam kurun waktu 17 Juli 1976-31 Maret 1977, pemerintah Indonesia menyuntikan dana untuk pembangunan perumahan, rumah sakit, gedung sekolah, serta proyek air minum dan rumah sakit. Sementara itu, pada tahun 1977-1978, pemerintah pusat mengeluarkan dana 6,6 miliar rupiah untuk pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, koperasi, pembangunan desa, dan sektor kesehatan. Dilihat dari pengeluaran total anggaran pada tahun 1976-1980, dana yang telah dikeluarkan pemerintah RI untuk Propinsi Timor Timur sebesar 99,913 miliar rupiah untuk pembangunan proyek-proyek berdasarkan keputusan presiden, 113,999 miliar rupiah untuk proyek sektoral, dan 64,705 miliar rupiah untuk anggaran belanja rutin. Anggaran ini melebihi anggaran rutin Propinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan Propinsi Jawa Tengah (Abdul Syukur, dkk, 2012: 537).

Dilihat dari kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang dilakukan pemerintah pusat, dapat digambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah

melakukan banyak kegiatan pembangunan untuk menjadikan propinsi Indonesia termuda ini dapat bersaing dengan propinsi lainnya.

C. Peristiwa Sesudah Integrasi tahun 1976-1999

Timor Timur bergabung dengan wilayah Republik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976 dengan sebuah proses yang cukup panjang dan demi integrasi tersebut, ribuan nyawa melayang bertempur di medan perang. Konflik internal antara partai Fretilin-UDT memicu keterlibatan pihak asing untuk turut campur dalam proses dekolonisasi yang dilakukan oleh pemerintah Portugis, dan salah satunya Indonesia menjadi salah satu negara tujuan integrasi Timor Timur tersebut. Setelah berintegrasi dengan Indonesia bukan berarti Timor Timur tidak mengalami permasalahan, baik itu dari rakyat Timor Timur yang kontra terhadap penggabungan Timor Timur ke Indonesia, maupun permasalahan yang terjadi ketika Timor Timur menjadi bagian NKRI.

Sejak terbentuknya Propinsi Timor Timur mulai 1 Januari 1989 menunjukkan bahwa, integrasi sudah menjadi ketetapan bagi pemerintah RI. Integrasi tidak lagi dapat dibatalkan dan rakyat Timor Timur mulai menerima kenyataan sehingga pada akhirnya dunia internasional pun mengikutinya.

Timbulnya berbagai Gerakan Resistensi kontra integrasi Timor Timur, runtuhnya rezim orde baru dan adanya campur tangan negara asing dalam masalah Timor Timur telah mempengaruhi status negara tersebut. Keinginan rakyat Timor Timur untuk mendapatkan hak penentuan nasibnya sendiri ditunjukkan dengan adanya berbagai perlawanan yang didukung oleh kalangan gereja. Runtuhnya

Orde Baru yang ditandai dengan berbagai krisis yang melanda Indonesia telah menjadi peluang besar bagi Rakyat Timor Timur dalam memperjuangkan nasibnya. Melengkapi hal tersebut, Australia sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM, yang kemudian ikut terlibat secara aktif dalam mendukung keinginan rakyat Timor Timur untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia (Syamsul Hadi, dkk, 2007: 193).

Operasi militer lanjutan pun masih dilaksanakan oleh militer Indonesia, karena masih ada sisa-sisa gerakan Fretilin di wilayah pedalaman dan pegunungan di Dili. Pada bulan September tahun 1977 Operasi lanjutan ini dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan pasukan tambahan sebanyak 15.000 tentara, selain itu operasi ini juga di dukung penggunaan pesawat pembom anti personel darat OV-10 Bronco buatan AS dan pesawat Nomads buatan Australia. Operasi militer ini terus berlanjut hingga tahun 1978, dan dalam operasi militer tersebut, pada tanggal 31 Desember 1978 berhasil menewaskan pemimpin Fretilin yaitu Nicolau Lobato dalam penyeragaman ABRI. Operasi militer Indonesia ini pada akhirnya memaksa penduduk yang ikut bebergerilya bersama Fretilin di pegunungan-pegunungan mulai menyerah. Banyak penduduk pengikut Fretilin yang tewas akibat pemboman TNI-AU (Abdul Syukur, 2012: 534)

Setelah tewasnya Lobato, pemimpin tertinggi Fretilin akhirnya digantikan oleh Xanana Gusmao. Sebagai pemimpin gerakan, Gusmao berusaha menghimpun kembali kekuatan dan melakukan reorganisasi dalam tubuh Fretilin. Upayanya dilakukan dengan menyelenggarakan sebuah konferensi reorganisasi nasional bagi gerakan Fretilin (Coelho, 2012: 39).

Fretilin mulai bersedia mengadakan dialog untuk bernegosiasi dengan ABRI untuk mengajukan rencana perdamaian, dalam rencana perdamaian tersebut, Fretilin mengajukan empat tuntutan terhadap Indonesia, yaitu: (1) penarikan mundur pasukan Indonesia dari Timor Timur; (2) pasukan PBB dilibatkan dalam proses perdamaian; (3) referendum yang bebas dan adil; (4) Falintil sebagai kekuatan bersenjata Fretilin tetap dipertahankan dalam hal ini. Namun tuntutan Xanana tersebut tidak ditanggapi oleh pihak ABRI, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut Jenderal L.B. Moerdani memperingatkan agar Fretilin menyerah atau menghadapi penumpasan oleh ABRI.

Perlawanan antara Fretilin dengan pasukan ABRI terus berlangsung, pada bulan September 1983, Indonesia melakukan operasi militer kembali dalam tujuannya untuk menumpas Fretilin. Kali ini operasi difokuskan ke wilayah Timor Timur dimana Falintil masih kuat. Militer Indonesia menempatkan Kopassandha untuk pertama kalinya di garis depan dan didukung oleh kekuatan udara (Taylor , 1998: 265). Meskipun hampir binasa, pihak Fretilin masih bisa selamat karena Xanan Gusmao berhasil menghimpun kekuatan yang tidak hanya dari Fretilin atau Falintil saja, namun juga kekuatan dari lapisan masyarakat Timor yang merasakan penderitaan yang sama akibat invasi Indonesia dulu. Selain Gusmao, seorang pemimpin lain juga muncul pada saat itu, yaitu Dom Carlos Felipe Belo yang diangkat sebagai kepala Gereja Katolik di Timor Timur pada tahun 1983, dan beliau bertindak sebagai pembela yang gigih untuk penentuan nasib sendiri, serta menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat sipil internasional (Hendro Subroto, 1998: 271-275).

Sebagai pemimpin Fretilin, Xanana Gusmao melakukan beberapa perubahan strategi dalam mewujudkan kemerdekaan Timor Timur. Xanana berusaha merubah citra Fretilin yang kekiri-an menjadi kanan, dan upaya yang dilakukan tidak lagi secara militer, namun melalui unsur politik. Hal tersebut dilihat dari banyaknya pasukan militer Indonesia yang berada di Timor Timur, dan menurutnya tidak akan berhasil menghalau militer Indonesia. Xanana tidak lagi terlalu mengidentifikasikan dirinya sebagai pemimpin Fretilin, namun sebagai pejuang nasionalis rakyat Timor Timur (Coelho, 2012: 64).

Pada dasawarsa 1990-an, Gerakan Kemerdekaan Timor Timur memfokuskan kampanye kemerdekaannya melalui kampanye diplomatik. Pada dasawarsa ini pula, tiga peristiwa penting yang memberi pengaruh besar terhadap Gerakan Kemerdekaan Timor Timur terjadi. Adapun tiga peristiwa tersebut adalah: Pembantaian Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991; penangkapan Xanana Gusmao pada bulan November 1992 dan penghargaan nobel perdamaian kepada Uskup Belo pada bulan Oktober 1996.

Tragedi Santa Cruz telah mengubah secara permanen cara dunia memandang pendudukan Timor Timur oleh Indonesia. Untuk pertama kali sejak invansi 1975, kebrutalan militer Indonesia terhadap warga sipil terekam dalam film oleh media internasional. Film tersebut dibuat oleh Max Stahl yang diselundupkan ke Amsterdam oleh wartawan Belanda dan beberapa hari setelah pembantaian awal, film tersebut ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang pendudukan Indonesia yang selama itu disembunyikan. Bukti yang kuat tersebut ditambah pula dengan foto-

foto yang diambil oleh fotografer Inggris, Steve Cox sehingga nampak jelas bahwa penindasan yang keras oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor Timur ini tidak lagi bisa disangkal (Kirsty Sword Gusmao, Lennox, 2003: 38-39).

Insiden Dili ini dipicu oleh pembatalan sepihak dari kunjungan Parlemen Portugal ke Dili. Akibat dari pembatalan itu terjadilah demonstrasi pada tanggal 28 Oktober 1991 dari kelompok anti integrasi yang kemudian bentrok dengan kelompok pro integrasi di Dili. Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan dua orang meninggal yaitu seorang dari kelompok pro Integrasi di Dili. Kerusuhan yang terjadi mengakibatkan dua orang meninggal yaitu seorang dari kelompok anti integrasi bernama Sebastio Gomes Rangel dan seorang dari kelompok pro integrasi yang bernama Alfonso Henriques (Jasmi, 2002: 59).

Pada tanggal 12 November 1991, kelompok anti integrasi menyelenggarakan misi di Gereja Motael untuk mengenang kematian Sebastio Gomes. Setelah misa selesai, sekitar 2.500 orang Timor Timur berarak ke Makam Santa Cruz yang terletak beberapa kilometer dari Gereja Motael. Mereka juga merencanakan melewati Hotel Turismo, tempat menginapnya Prof. Pieter Kooijmans (Pelapor Khusus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB) yang kebetulan sedang berkunjung ke Timor Timur. Prosesi tersebut kemudian berubah menjadi sebuah kerusuhan ketika ada yang menyerang dan melukai Mayor ABRI Andi Gerhan Lantara. Dalam keadaan kacau terjadilah penembakan dari pasukan ABRI ke arah demonstran yang mengakibatkan banyak korban tewas dan luka-luka. Dalam peristiwa tersebut, seorang berkebangsaan Selandia Baru tewas, dua wartawan AS terluka, dan seorang wartawan Inggris ditangkap ABRI. Dengan

kejadian itu, lalu Fretilin menuduh ABRI telah melakukan pembantaian di Santa Cruz (PPSDRI, 1998: 715).

Peristiwa Santa Cruz telah menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional. Pers di Inggris, Amerika, dan Eropa menggambarkan penembakan di Santa Cruz sebagai kebiadaban tentara Indonesia dalam insiden Dili. *The Washington Post* bahkan menyebut insiden penembakan di Dili tersebut meminta dukungan masyarakat Eropa untuk mengutuk tindakan Indonesia. Sementara itu Perdana Menteri Australia Bob Hawke juga mengecam tindakan Indonesia itu dan menunda kunjungannya ke Indonesia. Bahkan beberapa negara mulai mengguhkan program bantuannya kepada Indonesia, seperti Belanda, Kanada, dan Denmark. Pemerintah Indonesia pun tidak dapat mengelak dari serangan pers luar negeri (Jawahir, 2002: 168).

Setelah tragedi Santa Cruz tahun 1991 dan penangkapan Xanana Gusmao tahun 1992, satu peristiwa penting lainnya terjadi empat tahun kemudian yaitu pemberian penghargaan nobel perdamaian terhadap Uskup Belo dan Jose Ramos Horta sebagai sebuah momen pendorong bagi perjuangan rakyat Timor Timur untuk diakui secara internasional.

Turunnya Soeharto memberikan celah kepada PBB dan masyarakat internasional untuk meningkatkan tekanannya kepada Indonesia dalam mencapai sebuah solusi untuk masalah Timor Timur. PBB mengatur kembali diskusi antara Portugal dan Indonesia yang dulu pernah dilakukan menjelang integrasi Timor Timur ke Indonesia. Pertemuan antara mereka berkisar seputar paket otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia terhadap wilayah tersebut, menurut Indonesia

otonomi khusus merupakan sebuah solusi akhir dari masalah Timor Timur, sedangkan menurut Portugal, otonomi khusus hanyalah salah satu tahap dalam sebuah proses penentuan nasib sendiri (Perserikatan Bangsa Bangsa dan Timor Lorosae, 2002: 7).

Naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soeharto pada tahun 1998, telah memberi pengaruh besar kepada proses kemerdekaan Timor Timur. Presiden Habibie dalam masalah Timor Timur sungguh berbeda, jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya, dan kebijakannya telah mengherankan dunia. Dia mengumumkan akan menawari kesempatan untuk otonomi penuh kepada rakyat Timor Timur (Zaky Anwar Makarim, dkk, 2003: 28). Di dalam proposal Habibie mengenai otonomi khusus bagi Timor Timur, dinyatakan bahwa pemerintah di Jakarta akan bertanggung jawab atas beberapa hal saja. Keputusan tersebut mencakup urusan kebijakaksanaan luar negeri menjaga keamanan dari penyerbuan asing, dan masalah keuangan Timor Timur.

Banyak ahli politik dan ekonomi Indonesia mempercayai bahwa, pengumuman ini adalah jawaban Presiden Habibie atas tekanan internasional dalam masalah Timor Timur (Syamsul Hadi, dkk, 2007: 233). Tekanan tersebut kemudian semakin besar dirasakan oleh pemerintah Indonesia sebagai akibat krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 silam. Pemerintah Indonesia masih harus bergantung pada negara-negara barat untuk merekonstruksi ekonominya. Oleh karena itu ndonesia terpaksa untuk berkompromi soal lain juga, termasuk pendiriannya terhadap Timor Timur.

Pada bulan Januari 1999, Presiden Habibie mengejutkan banyak orang dan mendapat tantangan dari pemerintahnya sendiri khususnya dari TNI. Habibie menyatakan bahwa Indonesia akan memperbolehkan rakyat Timor Timur untuk menentukan sendiri masa depan mereka, termasuk kemerdekaan jika itu memang begitu sangat diinginkan dan telah menjadi kehendak mereka. Walaupun demikian, pemerintah Habibie merekomendasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan undang-undang 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia (Emmerson, 2001: 602).

Negoisasi antara Portugal dan Indonesia diarahkan untuk merampungkan suatu mekanisme dalam melaksanakan pilihan ini. Ketika negoisasi-negoisasi tengah berlangsung pada bulan-bulan awal tahun 1999, TNI menggerakkan milisi bersenjata sebagai tindakan tidak setuju atas keputusan Presiden. Keterbukaan politik yang relatif pada pertengahan tahun 1998 telah hilang, dan kekerasan selalu menjadi ancaman terhadap para pendukung pro-kemerdekaan. Pembantaian Dili dan Liquica oleh milisi yang didukung TNI mengejutkan masyarakat internasional, seiring dengan makin banyaknya rakyat Timor Timur yang mengungsi karena takut akan kekerasan (PBB dan Timor Lorosae, 2002: 10).

Negoisasi antara Portugal dan Indonesia mencapai puncaknya dengan yang dikenal sebagai Persetujuan New York 5 Mei 1999, yang ditandatangani oleh Menlu Ali Alatas dari Indonesia, Menlu Jaime Gama dari Portugal dan Sekjen PBB Kofi Annan. Dilihat dari isi persetujuan yang mencangkup tiga hal (Zacky Anwar Makarim, 2003: 97) yaitu:

1. Kesepakatan induk tentang persetujuan Indonesia-Portugal mengenai masalah Timor Timur.

2. Persetujuan tentang modalitas atau tata cara jajak pendapat lewat pemungutan suara secara langsung, bebas, jujur, serta adil.
3. Persetujuan tentang pengaturan keamanan jajak

Selanjutnya Persetujuan New York 5 Mei 1999 menetapkan bahwa, Indonesia menerima resolusi PBB untuk mengirimkan satu Tim Penilai (*Assessment Team*) dari Departemen Operasi Penjaga Perdamaian ke Timor Timur melalui UNAMET untuk menjaga perdamaian selama proses jajak pendapat berlangsung (Zaky Anwar Makarim, 2003: 145).

Menyusul perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia internasional yang makin menguat, pemerintah Habibie mengambil terobosan kebijakan untuk menyelenggarakan jajak pendapat yang akan menentukan masa depan Timor Timur. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh rakyat Timor Timur, yaitu otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian dari Indonesia; atau merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999 menandai dimulainya hari bersejarah di Timor Timur. Saat itu rakyat yang selama ini hidup dalam kekerasan dan penderitaan diberikan haknya untuk menentukan nasib sendiri. Selama hari-hari sebelum jajak pendapat kelompok milisi pro Indonesia melakukan kampanye teror supaya mencegah rakyat Timor Timur untuk memberikan suara dengan menolak otonomi khusus (Syamsul Hadi, dkk, 2007: 191).

Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan dan hasilnya 94.388 (21,5%) memilih otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) memilih untuk merdeka dari Indonesia. Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di Timor Timur. Milisi pro-integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan penyerangan

terhadap kelompok pro- kemerdekaan. Namun Indonesia harus menerima kenyataan dengan berbesar hati, seperti yang termuat dalam majalah *Tempo* edisi 12 September 1999 tertulis, “Republik Timor Lorosae Merdeka”. Setelah pemungutan suara, setidaknya enam personil *United Nations Mission in East Timor* (UNAMET) terbunuh dalam kekerasan yang terjadi. Situasi keamanan semakin tidak terkendali, maka seluruh staf UNAMET yang saat itu dievakuasikan ke Darwin, Australia (Zaky Anwar Makarim, 2003: 18).

Ada laporan yang menyatakan bahwa TNI ikut terlibat dalam kekerasan yang terjadi pasca referendum. Namun semua pihak mengakui bahwa sekalipun TNI tidak terlibat, mereka tidak bisa bahkan tidak mau menghentikan kekerasan tersebut. Jika pun tentara Indonesia tidak bisa menghentikan kekerasan, pemerintah Indonesia tetap tidak membolehkan tentara asing termasuk tentara PBB, masuk ke wilayah tersebut untuk memulihkan hukum dan tata tertib. Setelah kekerasan di Timor Timur berjalan, reaksi dunia pun berubah. Mula-mula, negara-negara Barat enggan untuk mencampuri keadaan di Timor Timur. Lalu kemudian Amerika Serikat menghentikan semua penjualan senjata dan hubungannya dalam bidang militer dengan Indonesia (Zaky Anwar Makarim, dkk, 2003: 151).

Akhirnya, pada tanggal 12 September 1999 Presiden Habibie mengubah pendirian dan membolehkan pasukan internasional untuk mengakhiri keadaan di Timor Timur. Di bawah pimpinan PBB, *International Force in East Timor* (INTERFET) didirikan dengan tujuan untuk memulihkan perdamaian dan menghentikan kekerasan. TNI diminta mengundurkan diri dari Timor Timur, karena dianggap tidak lagi mampu mengamankan situasi pasca jajak pendapat.

Pasukan multinasional yang terbentuk atas dasar Resolusi Dewan Keamanan 1264 ini dikomandani oleh Mayjen Peter Cosgrove dari Australia, dan sekaligus sebagai negara penyumbang pasukan terbesar dalam INTERFET (Syamsul Hadi, dkk, 2007: 216).

Sejak saat itu, pasukan PBB berusaha menjaga keamanan di wilayah Timor Timur, sementara pasukan ABRI ditarik dari sana. Pada masa transisi inilah Xanana Gusmao kemudian dibebaskan dan kembali ke Timor Timur. Ia segera membentuk pemerintahan sementara di bawah koordinasi pihak UNAMET. Tiga tahun kemudian, pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur memerdekakan diri dan mengganti nama menjadi Republik Demokrasi Timor Leste atau yang lebih terkenal dengan Timor Leste. Timor Leste merupakan negara pertama yang lahir pada abad XXI (Abdul Syukur, dkk, 2012: 547).

